

Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah 3T Indonesia: Analisis Fungsi Perencanaan Pendidikan Nasional Berbasis Digital

Rahma Aulia Irmianti¹, Nihayatul Amanah², Dewi Masithoh³, Rafi Yudha Pratama⁴, Mutammam⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail: rahma.aulia.irmianti24083@mhs.uingusdur.ac.id¹,

nihayatul.amanah24002@mhs.uingusdur.ac.id²

dewi.masithoh24097@mhs.uingusdur.ac.id³,

rafi.yudha.pratama24062@mhs.uingusdur.ac.id⁴, mutammam@uingusdur.ac.id⁵

Abstrak

Ketimpangan akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses teknologi, serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perencanaan pendidikan nasional dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T serta mengkaji optimalisasi perencanaan pendidikan berbasis digital sebagai solusi strategis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan nasional memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah kebijakan, pemerataan sumber daya pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya juga masih menghadapi beberapa kendala berupa pendekatan yang sentralistik, penggunaan data yang belum optimal, serta kurangnya penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, digitalisasi perencanaan pendidikan melalui pemanfaatan sistem informasi pendidikan, *data-driven policy*, dan *evidence-based planning* dinilai mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendidikan, Daerah 3T, Perencanaan Pendidikan Nasional, Digitalisasi Pendidikan.

Abstract

Inequality in access to education in the outermost, most remote, and disadvantaged (3T) regions remains a challenge to education development in Indonesia. This problem is influenced by geographic conditions, limited infrastructure, low access to technology, and the unequal distribution of teaching staff. This study aims to analyze the function of national education planning in addressing educational inequality in the 3T regions and to examine the optimization of digital-based education planning as a strategic solution. The study used a

descriptive qualitative method with a library research approach. The results indicate that national education planning has a strategic function in determining policy direction, equitable distribution of educational resources, and improving education quality. However, its implementation still faces obstacles such as a centralized approach, suboptimal use of data, and a lack of policy alignment with regional needs. Therefore, digitalization of education planning through the use of education information systems, data-driven policy, and evidence-based planning is considered capable of increasing the effectiveness of education policies in a more targeted and sustainable manner.

Keywords: Education Inequality, 3T Regions, National Education Planning, Education Digitalization.

LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ketimpangan pendidikan di daerah tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta rendahnya akses terhadap teknologi dan informasi (Falah & Hadna, 2022).

Kesenjangan pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang signifikan, khususnya di wilayah 3T. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2025 masih berada pada kisaran 9 tahun atau setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Badan Pusat Statistik, 2025). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk belum menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, yang seharusnya menjadi standar minimal dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan distribusi layanan pendidikan antarwilayah, terutama di daerah 3T yang menghadapi kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya tenaga pendidik. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, maka berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pendidikan yang lebih adaptif, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan daerah guna mengurangi ketimpangan tersebut secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berupaya mengurangi kesenjangan tersebut, salah satunya melalui penguatan basis data pendidikan nasional seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan kebijakan. Data ini mencakup indikator penting seperti angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, kondisi sarana prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik (Haddar et al., 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih

menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah 3T (Fadilah et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi, era digital sebenarnya membuka peluang baru dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Transformasi digital memungkinkan pembelajaran dilakukan secara lebih fleksibel dan menjangkau wilayah terpencil. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa daerah 3T masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat (Supranata & Fajarini, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan belum dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh perencanaan yang terarah dan berbasis data.

Dalam konteks tersebut, perencanaan pendidikan memiliki peran penting sebagai instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan prioritas, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Perencanaan yang adaptif, kontekstual, dan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan di era saat ini. Dengan pendekatan perencanaan yang tepat, kesenjangan akses pendidikan di daerah 3T diharapkan dapat diminimalisasi secara bertahap.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T, peran perencanaan pendidikan nasional dalam mengatasi ketimpangan tersebut, serta optimalisasi perencanaan berbasis digital sebagai solusi strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketimpangan pendidikan, mengkaji fungsi perencanaan pendidikan nasional, serta merumuskan strategi optimalisasi perencanaan berbasis digital. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pemerataan pendidikan yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan merupakan kondisi tidak meratanya kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas (Septiana et al., 2024). Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan kualitas satuan pendidikan, distribusi tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini masih menjadi tantangan karena dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, dan pemerataan kebijakan pendidikan yang belum optimal (Ulya et al., 2025).

2. Karakteristik Daerah 3T

Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) merupakan wilayah yang memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan (Vega et al., 2024). Wilayah ini umumnya memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, minim infrastruktur, keterbatasan tenaga pendidik, serta rendahnya akses teknologi informasi. Hal tersebut menyebabkan kualitas layanan pendidikan di daerah 3T masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.

3. Teori Fungsi Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan

Perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan proses penentuan tujuan, strategi, dan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi perencanaan mencakup pengambilan keputusan, penentuan prioritas, serta pengalokasian sumber daya pendidikan secara merata. Dalam konteks pendidikan nasional, perencanaan berbasis data menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran (Harbes et al., 2024).

4. Transformasi Digital dalam Pendidikan

Transformasi digital dalam pendidikan adalah proses integrasi teknologi digital dalam sistem pembelajaran dan manajemen pendidikan (Asri et al., 2024). Digitalisasi memungkinkan pengelolaan data pendidikan secara lebih akurat, pembelajaran jarak jauh, serta pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Di Indonesia, implementasi sistem seperti Dapodik dan Rapor Pendidikan menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pendidikan nasional yang lebih efektif dan merata.

5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor geografis dan infrastruktur yang belum merata (Fadillah et al., 2025). Penelitian lain menemukan bahwa pemanfaatan sistem perencanaan pendidikan berbasis digital membantu pemerintah dalam memetakan kondisi pendidikan secara lebih akurat dan objektif. Selain itu, digitalisasi pendidikan juga dinilai berpotensi mengurangi kesenjangan akses, meskipun masih terkendala infrastruktur di daerah 3T (Yohana et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T Indonesia serta mengkaji peran fungsi perencanaan pendidikan nasional berbasis digital dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan pendidikan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan di wilayah 3T dan sistem perencanaan pendidikan berbasis digital.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan informasi, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T serta kontribusi perencanaan pendidikan nasional berbasis digital dalam mengurangi kesenjangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 3T dalam Perspektif Struktural

Ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T dapat dipahami sebagai persoalan yang bersifat struktural dan multidimensional. Artinya, ketimpangan tersebut tidak muncul dari satu penyebab saja, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan berbagai faktor yang saling

memengaruhi (Samhaji & Anggara, 2025). Dalam konteks ini, kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama, di mana banyak wilayah 3T berada pada daerah terpencil, kepulauan, atau pegunungan yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan (Azmi et al., 2025). Selain itu, keterbatasan pembangunan ekonomi daerah serta kondisi sosial masyarakat yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar turut memperkuat ketidakmerataan pendidikan. Akumulasi dari berbagai kondisi tersebut menyebabkan layanan pendidikan tidak terdistribusi secara seimbang, sehingga wilayah 3T cenderung tertinggal dibandingkan daerah yang lebih berkembang (Wijoyo et al., 2026).

Jika dilihat dari aspek infrastruktur, tantangan yang dihadapi daerah 3T masih cukup besar dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Banyak sekolah di wilayah tersebut belum memiliki fasilitas yang memadai, baik dari segi kondisi bangunan, ketersediaan sarana belajar, maupun akses terhadap fasilitas penunjang seperti listrik dan jaringan internet (Marwan et al., 2024). Padahal, dalam konteks pendidikan saat ini yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital, keberadaan infrastruktur tersebut menjadi sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi ini menyebabkan peserta didik di daerah 3T memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber belajar yang lebih luas dan modern dibandingkan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam pemanfaatan teknologi pendidikan.

Selain faktor infrastruktur, ketimpangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia pendidikan, khususnya tenaga pendidik. Di banyak wilayah 3T masih ditemukan keterbatasan jumlah guru yang tersedia, bahkan tidak jarang satu guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus atau ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan kondisi kerja yang menantang. Selain masalah jumlah, kualitas serta pemerataan kompetensi guru juga menjadi persoalan tersendiri yang berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Situasi ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hasil pendidikan di daerah tersebut (Sagita & Jeni, 2025).

Dampak dari berbagai ketimpangan struktural tersebut pada akhirnya terlihat pada rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T. Ketertinggalan ini tidak hanya tercermin dari hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari terbatasnya kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengembangkan kompetensi secara lebih luas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah, karena pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T perlu dipandang sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih terarah, berbasis data, serta didukung oleh transformasi digital dalam perencanaan pendidikan nasional agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif.

Analisis Fungsi Perencanaan Pendidikan Nasional dalam Mengatasi Ketimpangan

Perencanaan pendidikan nasional merupakan fungsi strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta upaya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan

mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pentingnya perencanaan pendidikan telah diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) harus dilakukan sebagai langkah awal dalam pengelolaan sekolah sebelum penetapan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Penyusunan program pendidikan juga harus didasarkan pada Evaluasi Diri Sekolah (EDS) agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya memperkuat mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan bahwa setiap lembaga pendidikan harus dikelola melalui perencanaan jangka pendek dan jangka panjang secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, seluruh proses perencanaan pendidikan juga harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Fitriah et al., 2025).

Meskipun berbagai regulasi telah disusun secara komprehensif, pelaksanaan perencanaan pendidikan nasional masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengatasi ketimpangan pendidikan antarwilayah. Salah satu permasalahan utama terlihat dari adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata daerah, khususnya wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Perencanaan pendidikan yang bersifat sentralistik sering kali kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis daerah sehingga kebijakan yang diterapkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi perencanaan pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya wilayah 3T yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah perkotaan. Sebagai contoh, penerapan program pembelajaran berbasis teknologi digital di beberapa daerah terpencil belum berjalan optimal karena keterbatasan jaringan internet, akses listrik, serta minimnya fasilitas pendukung pembelajaran. Selain itu, distribusi guru dan tenaga kependidikan yang belum merata juga menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan di lapangan. Daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan jumlah tenaga pendidik yang memadai, sedangkan banyak sekolah di daerah terpencil masih mengalami kekurangan guru, keterbatasan ruang belajar, serta rendahnya akses terhadap sarana pendidikan yang layak (Sampaleng & Baharuddin, 2023).

Kelemahan lain dalam perencanaan pendidikan nasional adalah belum optimalnya penggunaan data yang akurat dan real-time sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dalam praktiknya, proses perencanaan masih sering menggunakan data administratif yang tidak diperbarui secara berkala sehingga kondisi aktual sekolah di lapangan tidak sepenuhnya tergambarkan (Anjani & Nurahmayanti, 2025). Akibatnya, beberapa kebijakan pendidikan menjadi kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa fungsi perencanaan berbasis data belum dilaksanakan secara optimal, padahal data yang akurat dan real-time menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pendidikan. Misalnya, terdapat sekolah yang dalam data administrasi tercatat memiliki sarana memadai, tetapi pada kenyataannya mengalami kerusakan bangunan atau kekurangan fasilitas pembelajaran. Perubahan jumlah peserta didik, kebutuhan tenaga pendidik, serta perkembangan kondisi sosial masyarakat yang berlangsung cepat juga sering kali belum direspons secara maksimal dalam proses perencanaan pendidikan. Padahal, perkembangan teknologi informasi seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sistem data pendidikan yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diperbarui sehingga kebijakan pendidikan dapat disusun secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain persoalan data, pendekatan perencanaan pendidikan yang kurang kontekstual juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Perencanaan pendidikan nasional masih cenderung menggunakan standar yang sama untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah. Pada tingkat sistem pendidikan, perencanaan mutu diwujudkan melalui kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Delapan standar nasional pendidikan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan program peningkatan mutu secara sistematis. Namun, penerapan standar tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi daerah, terutama wilayah 3T, sehingga beberapa kebijakan pendidikan sulit diterapkan secara optimal akibat keterbatasan sarana, akses teknologi, dan distribusi tenaga pendidik (Zakariah et al., 2026).

Perbedaan kondisi wilayah menyebabkan kebutuhan pendidikan di daerah perkotaan berbeda dengan wilayah pedalaman maupun kepulauan. Daerah perkotaan umumnya lebih membutuhkan pengembangan inovasi dan teknologi pendidikan, sedangkan daerah 3T lebih memerlukan pemerataan akses pendidikan, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana sekolah. Kurangnya pendekatan kontekstual menyebabkan program pendidikan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi perencanaan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada standar nasional, tetapi juga mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal agar pemerataan pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu disusun secara fleksibel dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar kebijakan pendidikan dapat meningkatkan mutu sekaligus pemerataan pendidikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap kebijakan pemerataan pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga program distribusi guru ke daerah terpencil. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya evaluasi program pendidikan secara berkelanjutan. Ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah masih terlihat dari perbedaan kualitas fasilitas pendidikan, akses teknologi, kompetensi tenaga pendidik,

dan capaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pemerataan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar perencanaan pendidikan nasional dapat berjalan lebih efektif. Dengan perencanaan yang berbasis data akurat, bersifat kontekstual, dan didukung evaluasi yang berkelanjutan, tujuan pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia akan lebih mudah diwujudkan.

Optimalisasi Perencanaan Pendidikan Berbasis Digital sebagai Solusi Strategis

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan, termasuk dalam proses perencanaan pendidikan nasional. Digitalisasi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pendukung administrasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran. Perencanaan pendidikan berbasis digital memungkinkan pemerintah memperoleh data pendidikan secara lebih akurat sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, digitalisasi memperkuat fungsi perencanaan pendidikan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan program, serta penentuan prioritas pembangunan pendidikan secara lebih efektif dan terukur. Pendekatan ini dikenal sebagai *data-driven policy*, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang terukur (Mahaira et al., 2025). Dalam konteks pendidikan nasional, penggunaan data menjadi sangat penting karena Indonesia memiliki kondisi geografis dan kebutuhan pendidikan yang beragam di setiap daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat memetakan kebutuhan sekolah, jumlah peserta didik, distribusi tenaga pendidik, hingga kondisi sarana prasarana secara lebih sistematis. Oleh karena itu, digitalisasi dalam perencanaan pendidikan dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan nasional.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi pendidikan terlihat melalui pemanfaatan sistem informasi pendidikan seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan pemerintah untuk menghimpun data sekolah secara nasional. Sistem tersebut membantu pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan pendidikan di berbagai daerah (Handayani et al., 2024). Keberadaan sistem informasi pendidikan memberikan kemudahan dalam proses pendataan sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Selain Dapodik, perkembangan teknologi juga mendorong penggunaan berbagai platform digital dalam proses administrasi, evaluasi pembelajaran, serta pengawasan mutu pendidikan. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan proses perencanaan pendidikan dilakukan secara lebih transparan dan efisien dibandingkan metode konvensional yang sering mengalami keterlambatan data. Dengan adanya data yang lebih akurat dan mudah diperbarui, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan pendidikan secara lebih tepat, terutama bagi daerah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.

Perencanaan pendidikan berbasis digital juga berkaitan erat dengan pendekatan *evidence-based planning*, yaitu proses penyusunan kebijakan berdasarkan bukti dan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam pendekatan ini, data tidak hanya digunakan sebagai

pelengkap administrasi, tetapi menjadi dasar utama dalam menentukan program pendidikan yang akan dijalankan (Wirawan & Ratih, 2025). Melalui data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui daerah yang mengalami kekurangan guru, rendahnya angka partisipasi sekolah, atau keterbatasan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dibuat tidak bersifat umum, melainkan lebih terarah sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pendekatan berbasis kebutuhan ini penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah karena setiap daerah memiliki tantangan pendidikan yang berbeda. Selain itu, penggunaan data yang akurat juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran pendidikan karena program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan pendidikan nasional.

Dalam upaya mengoptimalkan perencanaan pendidikan berbasis digital, diperlukan beberapa strategi pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Salah satu strategi utama adalah penguatan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil dan wilayah 3T yang masih memiliki keterbatasan akses internet dan teknologi. Ketersediaan jaringan internet, perangkat teknologi, serta akses listrik menjadi faktor penting dalam mendukung digitalisasi pendidikan. Selain itu, distribusi guru berbasis data juga perlu dilakukan agar penyebaran tenaga pendidik lebih merata sesuai kebutuhan daerah. Melalui sistem pendataan digital, pemerintah dapat memetakan wilayah yang mengalami kekurangan guru sehingga proses penempatan tenaga pendidik menjadi lebih efektif. Strategi lainnya adalah pengembangan pembelajaran *hybrid* yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran digital untuk memperluas akses pendidikan. Model ini memungkinkan peserta didik belajar melalui kelas langsung maupun platform digital seperti LMS, video pembelajaran, dan konferensi daring. Pembelajaran *hybrid* menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik atau hambatan geografis karena proses belajar tetap dapat berlangsung secara fleksibel dan efektif. Selain meningkatkan akses pendidikan, model ini juga membantu meningkatkan literasi digital guru dan peserta didik di era perkembangan teknologi (Hamdani et al., 2025). Di samping itu, monitoring dan evaluasi pendidikan berbasis digital juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program pendidikan dapat dipantau secara berkala dan transparan. Dengan adanya sistem pengawasan digital, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui berbagai kendala di lapangan sekaligus melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Ketimpangan akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, rendahnya akses teknologi, serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik. Selain itu, perencanaan pendidikan nasional yang masih cenderung sentralistik dan kurang kontekstual menyebabkan kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan daerah secara optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan standar nasional pendidikan sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi perencanaan pendidikan berbasis digital menjadi solusi strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan melalui pemanfaatan sistem informasi pendidikan,

pendekatan *data-driven policy*, dan *evidence-based planning*. Penguatan infrastruktur digital, distribusi guru berbasis data, pengembangan pembelajaran *hybrid*, serta monitoring dan evaluasi berbasis digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan sehingga pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi fungsi perencanaan pendidikan berbasis digital, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, M., & Nurahmayanti, A. (2025). *Penerapan SIMDIK Dalam Meningkatkan Akurasi Data Untuk Perencanaan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Cigugur*. 2(2), 241–250.
- Asri, A., Ainun, N., Siregar, N., Liza, S., & Hidayatullah, R. (2024). *Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0*. 2, 216–224.
- Azmi, K., Mukhtar, L., & Burhan, L. I. (2025). *Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Literasi Digital Di Daerah 3T*. 1(1), 1–11.
- Fadilah, F. Z., Rizanah, S., Prayogi, G., Azizah, S. N., & Nasor, M. (2025). *Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan*. 04(08), 108–119.
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). *Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan*. 03(02), 217–225.
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). *Problematisasi Pendidikan Masa Pandemi Di Indonesia Pada Daerah 3-T (Terluar , Tertinggal , Dan Terdepan) Problematical Issues On Indonesian Education During Pandemic In The 3-T Regions (Frontier , Outermost , And Least Developed)*. 7. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Fitriah, S. B., Arrif'an, A. R., & Mardiyah. (2025). *Strategi Perencanaan Pendidikan Islam: Integrasi Renstra Dan Renop Dalam Mewujudkan Visi Lembaga*. 14(2), 146–161.
- Haddar, G. Al, Rinda, Fahmimroah, F., & Mulawarman, W. G. (2025). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Rapor Pendidikan: Strategi Pemerataan Di Era Merdeka Belajar*. 5(2), 199–206.
- Hamdani, F., Dinola, & Anwar. (2025). *Integrasi Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas: Studi Pengembangan Model Hybrid Learning Di Sman 1 Taliwang*. 5(7), 28–37.
- Handayani, E., Aliyyah, R. R., & Gani, R. A. (2024). *Penerapan Sistem Data Pokok Pendidikan Pada Sekolah Dasar*. 3, 2779–2803.
- Harbes, B., Karim, H. A., Sesmiarni, Z., & Armedo, M. (2024). *Perencanaan Pendidikan Dan Manajemen Pembiayaan (Mewujudkan Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan)*. Avwontom 2016.
- Mahaira, A., Harniati, S., & Assifa, F. (2025). *Model Kebijakan Lingkungan Adaptif Berbasis Data Real Time Untuk Pengelolaan Berkelanjutan*. 1(2), 57–65.
- Marwan, I., Gustaman, R. F., & Gandi, A. (2024). *Dikotomi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Indonesia*. 2(3), 155–161.
- Sagita, W. R., & Jeni, F. (2025). *Tantangan Profesionalisme Guru Di Daerah 3t (Tertinggal ,*

- Terdepan , Terluar) : Kajian Literatur.* 3(4), 83–95.
- Samhaji, & Anggara, F. D. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Pada Daerah Tertinggal Indonesia Pendahuluan.* 5(2), 99–112.
- Sampaleng, D., & Baharuddin. (2023). *Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan Dalam Otonomi Daerah Pada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Kecamatan Babelan.* 17(2), 119–126.
- Septiana, M., Solfema, S., & Putri, L. D. (2024). *Upaya Dalam Pemerataan Pendidikan Di Daerah Terpencil.* 1.
- Supranata, K., & Fajarini, S. D. (2025). *Transformasi Pendidikan Di Desa Padang Capo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Dalam Konteks Digital Society.* 6(3), 190–200.
- Ulya, S., Dinanti, M. R., & Saputra, R. W. (2025). *Ketimpangan Akses Dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Antarara Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah.* 04(02).
- Vega, A., P, J. A., & A, M. R. (2024). *Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia.* 1(2), 44–57.
- Wijoyo, H., Prasetya, E. D., Wardanai, D. K., & Sabandi, M. (2026). *Disparitas Pendidikan Perkotaan Dan Perdesaan: Implikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.* 4(4), 9826–9837.
- Wirawan, A., & Ratih, A. (2025). *Integrasi Kecerdasan Buatan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah : Pendekatan Evidence-Based Planning.*
- Yohana, R., Subandi, A., & Irsyad, I. (2024). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan.* 4(1), 21–29.
- Zakariah, F. H. A., Hasunah, U., & Tinus, A. (2026). *Perencanaan Dan Pengembangan Sistem Pendidikan.* V(April), 164–178.